

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dychkovskyy dan Ivanov menyatakan bahwa pariwisata tidak hanya pengetahuan warisan budaya untuk tujuan wisata, tetapi juga inklusi wisatawan ke dalam lingkungan budaya modern yang terlibat aktif dalam acara-acara budaya khas wilayah tertentu. Ketika budaya berkembang dan dipromosikan setiap saat, pariwisata hadir untuk memperkuat budaya melalui hasil ekonomi. Hal yang menjadi aspek utamanya adalah motivasi berwisata, yaitu keinginan masyarakat untuk mengunjungi monumen budaya, keinginan untuk mengetahui hal menarik dari tempat yang ingin dikunjungi, serta mengenal tradisi atau adat selama mengunjungi suatu tempat (Dychkovskyy & Ivanov, 2020, p. 75). Hal lain yang dapat dilakukan untuk memperkuat ekonomi selain pengelolaan sumber daya alam, pariwisata juga melibatkan warisan budaya untuk tujuan wisata dengan cara mengajak wisatawan secara aktif berpartisipasi dalam acara atau tradisi lokal. Dengan demikian, pariwisata dapat memperkuat budaya lokal melalui hasil ekonomi. Interaksi yang dihasilkan antara ketertarikan wisatawan dengan budaya lokal dapat menjadi nilai ekonomi, seperti diadakannya festival dan mengadakan penjualan tiket.

Dalam hal mempromosikan suatu destinasi wisata, diperlukan salah satu strategi efektif, yaitu dengan menyelenggarakan festival. Memasarkan pariwisata dapat melibatkan komunikasi, penyampaian pesan, penciptaan, dan nilai kepada khayalak umum, dalam hal ini adalah wisatawan. Diselenggarakannya suatu

festival dapat menampilkan keunikan budaya suatu kota, kilas balik sejarah, dan kreativitas lokal. Festival F8 merupakan kegiatan pariwisata yang dipelopori oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar demi mendukung peningkatan pariwisata pasca pandemi (Lambe & Husain, 2024, p. 1057). Festival tahunan internasional F8 merupakan salah satu strategi promosi destinasi wisata melalui penyelenggaraan festival. Kegiatan yang dimuat festival F8 menampilkan budaya unik dan memperkenalkan warisan sejarah kota Makassar. Makassar *International Eight Festival and Forum* (F8) hingga saat ini telah masuk dalam 10 besar Kharisma *Event Nusantara* (KEN) yang merupakan acara seni budaya terbesar yang diselenggarakan di Kota Makassar (Aminah, 2023). Hal tersebut membuktikan bahwa festival F8 berhasil menjadi daya tarik promosi pariwisata berskala nasional hingga internasional.

Melalui pencapaian yang dihasilkan, festival F8 dapat dijadikan salah satu wadah strategis untuk memperkuat eksistensi Indonesia dengan diplomasi budaya melalui festival dan mendorong hubungan kerja sama secara global. Kharisma *Event Nusantara* (KEN) sendiri mempertandingkan 319 *event* dari 34 provinsi di Indonesia yang memiliki lima aspek keunggulan, yaitu ide dan potensi inovasi, manajemen acara, pertumbuhan ekonomi kreatif, strategi komunikasi dan media, serta seni pertunjukan dan budaya (Lambe & Husain, 2024, p. 1057). Keberhasilan festival F8 hingga masuk dalam 10 besar KEN menunjukkan kualitas yang dimiliki festival F8 mampu bersaing dengan 319 *event* se-Indonesia. Penamaan F8 mewakili delapan bidang kesenian yang ditampilkan dalam festival, yaitu *food, fashion, fiction writers and fonts, flora and fauna, film, folks, fine art*, dan *fusion music*

(Aminah, 2023). Setiap bagian yang ditampilkan dalam F8 menunjukkan budaya khas Kota Makassar dari tradisional hingga modern. Kegiatan F8 menyediakan area yang berbeda untuk tiap bidang kesenian dan diselenggarakan selama tiga hari berturut-turut. Penampilan budaya, kreativitas lokal, dan *booth* untuk *partnership* serta UMKM juga disediakan terpisah yang menyebar di seluruh area F8. Sehingga, festival F8 dapat menjadi salah satu media untuk mengembangkan hubungan kerja sama dalam bidang seni budaya dan pariwisata.

Festival tahunan F8 ini digelar setiap tahun oleh Pemerintah Kota Makassar sejak 2016 lalu. Di tahun 2024, F8 membawa tema “*The Unity*” yang berlanjut dari tema di tahun 2023 yaitu “*The Next Gen Treasure*” (Fatimah, 2024). Penyelenggaraan F8 memberikan kontribusi bagi hubungan bilateral negara-negara yang bekerja sama dengan Kota Makassar. Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar dalam kunjungannya bersama Wali Kota Makassar ke Australia menambahkan bahwa F8 menjadi salah satu topik yang menarik bagi pihak Australia. Festival ini juga dapat menjadi wadah internasional untuk menampilkan dan mempromosikan seni rupa dari negara lain (Lambe & Husain, 2024, p. 1059). Festival F8 menampilkan budaya-budaya nusantara dan juga budaya asing dari negara-negara yang terlibat dalam Festival F8 tahun 2024, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, India, dan Singapura (Fatimah, 2024).

Dinas Pariwisata Kota Makassar melakukan *Public Relations & Publicity* dalam menerapkan strategi promosinya dengan bekerja sama dengan Metro TV untuk mengiklankan dan meliput secara eksklusif kegiatan F8 setiap tahun. Dalam taraf internasional, F8 bekerja sama dengan media-media Australia yang

memberitakan tentang penyelenggaraan kegiatan tersebut. Melalui Konsulat Jenderal Australia, F8 menawarkan untuk menjadi bagian dari penyelenggaraan F8 dengan membuka komponen seni rupa (Lambe & Husain, 2024, p. 1060). Penyelenggaraan festival F8 berperan untuk memperkuat diplomasi budaya dengan menjadi sarana kerja sama internasional untuk mempromosikan budaya yang melibatkan negara-negara yang bekerja sama dalam kegiatan festival F8 Makassar, salah satunya adalah Australia dan Singapura. Untuk memaksimalkan promosi, keterlibatan media tidak hanya menjangkau media lokal tetapi juga media internasional. Keterlibatan media internasional membuka peluang untuk negara-negara yang bekerja sama dengan Pemkot Makassar dalam festival F8 untuk menampilkan dan mempromosikan budaya mereka. Konsulat Jenderal Australia turut berperan dalam diplomasi budaya negara Australia dan Pemkot Makassar dengan menyetujui tawaran untuk berkontribusi sebagai penyelenggara F8.

Lokasi geografis Indonesia terletak diapit oleh dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oleh karena itu, lokasi Indonesia dinilai strategis dalam lintas perdagangan global terkhususnya negara-negara tetangga Indonesia, salah satunya Australia. Australia merupakan salah satu investor asing yang mempunyai potensi tinggi untuk Indonesia. Posisi Australia sebagai investor Indonesia menduduki peringkat ke- 9 dengan total penanaman modal AS\$ 9,4 Miliar. Investasi modal tersebut tidak hanya melalui penanaman modal langsung, tetapi juga melalui akuisisi perusahaan dan portofolio (Putri, Darwis, & Syahdan, 2021, p. 56). Hal ini mencerminkan potensi yang besar bagi Australia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Penanaman modal tersebut menunjukkan bagaimana Australia mengusahakan pendekatannya dengan Indonesia melalui memperkuat hubungan ekonomi. Selain itu, kerja sama Indonesia-Australia juga terlihat pada kerja sama *State-Province*, yaitu Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Timur dengan Australia Barat, Jakarta dengan New South Wales, Kawasan Timur Indonesia dengan Northern Territory, dan Jawa Tengah dengan Queensland. Kerja sama *Sister City* juga terbangun melalui hubungan Australia dan Indonesia, seperti Lismore dengan Ujung Pandang, Sydney dengan Jakarta, Brisbane dengan Semarang, Palmerstone dengan Kuoang, dan Darwin dengan Ambon (Putri, Darwis, & Syahdan, 2021, p. 56). Perkembangan hubungan kerja sama Indonesia-Australia menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan melibatkan pemerintah daerah Indonesia dan Australia. Faktor lokasi merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan kerja sama. Posisi strategis Indonesia memberikan keuntungan yang kompetitif oleh Pemkot Makassar untuk mengadakan festival F8 di Makassar yang merupakan salah satu pusat perdagangan Kawasan Timur Indonesia. Investasi dari Australia menunjukkan komitmen kerja sama dalam jangka panjang.

Sebagai bagian dari ASEAN, Singapura adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang bekerja sama dengan Indonesia dalam bidang pariwisata dan memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia (Hibatullah & Paksi, 2025, p. 10). Singapura merupakan salah satu pusat pariwisata di wilayah Asia Tenggara. Dengan memanfaatkan hubungan kerja sama Indonesia-Singapura, Indonesia dapat menjadikan Singapura sebagai mitra strategis untuk memperluas jaringan pariwisata Indonesia (Hibatullah & Paksi, 2025, p. 10). Kerja sama yang

dijalin sejak lama oleh Indonesia dan Singapura menunjukkan hubungan bilateral yang stabil. Singapura lalu membuka peluang lebih luas lagi bagi Indonesia untuk meningkatkan hubungan kerja sama pariwisatanya. Hal tersebut dapat bermanfaat bagi Indonesia untuk mempromosikan seni, budaya, dan potensi wisata lokal ke global. Negara Singapura menjadi investor utama negara Indonesia dalam sektor pariwisata dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bidang *e-government* dan pariwisata. Penandatanganan MoU ini membuka peluang kedua negara untuk memperkuat kerja sama di bidang pariwisata. Kekuatan hubungan kerja sama Indonesia-Singapura meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia yang berdampak pada meningkatnya devisa negara (Hibatullah & Paksi, 2025, p. 10).

Sebelum diselenggarakannya F8, bentuk kerja sama Pemerintah Kota Makassar hanya berfokus dalam aspek tertentu, seperti kerja sama *Sister City* dengan negara Korea dan kerja sama *Safe City* dengan negara Perancis (Palewai, 2017). Melalui penyelenggaraan Festival F8, peningkatan kerja sama terjadi melalui jumlah negara yang terlibat dalam kegiatan tersebut, yaitu terdapat sekitar 18 perwakilan dari negara asing hadir demi mendukung pelaksanaan Festival F8 (Hasanuddin, 2024). Negara-negara yang sebelumnya bekerja sama melalui *Sister City* dengan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang dari jalur perdagangan di Indonesia Timur, tertarik untuk berinvestasi mulai dari bidang pariwisata hingga infrastruktur (Sulsel, 2024). Kedua negara Singapura dan Australia merupakan dua negara yang memiliki hubungan dekat dengan Indonesia sekaligus merupakan negara yang berpartisipasi di festival F8 Kota Makassar.

Australia memiliki letak yang strategis dengan Indonesia terutama Indonesia bagian Timur, sedangkan Singapura merupakan negara ASEAN yang memiliki hubungan bilateral yang kuat dengan Indonesia. Negara Australia dan Singapura masing-masing memiliki jalinan kerja sama dengan Pemkot Makassar, sehingga keduanya memiliki peluang untuk meningkatkan kerja sama pariwisata lebih lanjut setelah pelaksanaan festival F8 Makassar. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis lebih detail mengenai dampak festival internasional F8 Makassar terhadap peningkatan kerja sama pariwisata dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, studi kasus negara Australia dan Singapura.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini membatasi analisa pelaksanaan kegiatan dalam rentang tahun 2019-2024 dengan fokus bagaimana festival tahunan internasional F8 berdampak pada kerja sama Australia dan Singapura dengan Pemerintah Kota Makassar di sektor pariwisata. Pemilihan tahun 2019 menjadi awal batasan penelitian yang diteliti, dimana pada tahun tersebut F8 Makassar masuk dalam *Top 10 KEN* dengan melihat dampak seperti apa yang telah dihasilkan oleh F8 dalam lima tahun terakhir hingga tahun 2024 yang menjadi batas tahun penelitian pada kerja sama Australia – Pemkot Makassar dan Singapura – Pemkot Makassar sekaligus tahun terakhir F8 Makassar sejauh ini telah dilaksanakan. Sektor yang menjadi fokus penelitian ini adalah sektor ekonomi dan pariwisata.

Adapun rumusan masalah yang dirumuskan oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana dampak festival tahunan internasional F8 terhadap peningkatan kerja sama pariwisata dengan Pemerinah Kota (Pemkot) Makassar dengan negara Australia dan Singapura dari tahun 2019-2024?

2. Bagaimana tantangan kerja sama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dengan negara Australia dan Singapura dari tahun 2019-2024 sebagai negara yang berpartisipasi dalam festival F8?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

C.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dampak festival tahunan internasional F8 terhadap peningkatan kerja sama pariwisata dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dengan negara Australia dan Singapura dari tahun 2019-2024.
2. Untuk menganalisis tantangan kerja sama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dengan negara Australia dan Singapura dari tahun 2019-2024 sebagai negara yang berpartisipasi dalam festival F8.

C.2 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman terkait teori kerja sama internasional dan diplomasi budaya melalui *event-event* kebudayaan, khususnya Festival Tahunan Internasional F8 sebagai media *soft diplomacy* untuk membangun kerja sama dengan negara Australia dan Singapura.
2. Secara akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan studi mengenai diplomasi dan kerja sama internasional dengan menjadikan pariwisata sebagai alat *soft diplomacy*, sehingga dapat memberikan pandangan pada mahasiswa(i) yang ingin melanjutkan pengembangan studi tentang bagaimana kerja sama internasional dapat dibangun melalui pariwisata dan budaya.
3. Secara praktikal, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk melihat kembali bagaimana efektivitas Festival F8 mencari peluang yang lebih luas lagi agar dapat

terus meningkatkan kerja sama internasional melalui penyelenggaraan kegiatan tersebut.

D. Kerangka Konseptual

a) Diplomasi Budaya

Konsep diplomasi budaya mulai digunakan secara luas hingga dapat kita kenal sampai sekarang sejak tahun kedua abad ke- 20an, di tengah-tengah terjadinya Perang Dingin antara Amerika Serikat – Uni Soviet (Grincheva, 2024, pp. 172-173). Kemunculan konsep diplomasi budaya didasari oleh promosi ideologi dan citra positif yang digunakan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet dibanding dengan menggunakan kekuatan militer.

Konsep diplomasi publik mengarah pada penghubung (media) antara pemerintah dan masyarakat luar negeri, yang bertujuan untuk menciptakan minat positif terhadap suatu negara dan memanipulasi opini publik masyarakat asing terhadap kebijakan dalam negeri dari negara pihak ketiga. Melalui transformasi tersebut, diplomasi publik menggabungkan aktor-aktor baru, seperti parlemen dan organisasi masyarakat sipil, kegiatan luar negeri, kerja sama pembangunan oleh sektor ketiga, atau pameran internasional. Diplomasi budaya seringkali disebut sebagai sub-diplomasi publik yang menjelaskan tindakan penghubung antara masyarakat luar negeri dan pemerintah melalui sumber daya serta kegiatan artistik dan intelektual (Zamorano, 2015, pp. 1-2). Konsep diplomasi budaya dapat membentuk opini masyarakat untuk memahami kebijakan dari negara yang bersangkutan. Opini tersebut dibentuk dengan melibatkan aktor non-pemerintah, seperti sektor swasta dan masyarakat sipil. Diplomasi budaya lalu direalisasikan dalam bentuk kegiatan internasional, seperti festival budaya.

Dalam memahami peran diplomasi budaya, perlu untuk membedakan beberapa kata kunci. Diplomasi budaya disebut juga dengan diplomasi publik yang memenuhi *national strategies* secara keseluruhan. Diplomasi budaya menyebabkan negara lain terpengaruh melalui “kekuatan spiritual”, seperti sastra. Kekuatan spiritual tersebut, yakni *soft diplomacy* seperti yang dimaksud oleh Joseph Nye pada tahun 1990. Kemampuan tersebut cenderung dikaitkan dengan *power* yang tak berwujud, seperti budaya, ideologi, dan bahasa. *Soft diplomacy* berbeda dengan *hard diplomacy* yang berwujud kekuatan militer dan ekonomi. Diplomasi budaya dapat memangkas adanya kesenjangan budaya dan memperbarui citra negara melalui *soft diplomacy* (Kexin, 2021, p. 1031). Diplomasi budaya berperan sebagai salah satu bentuk *soft diplomacy* yang meningkatkan ketertarikan internasional. Dengan demikian, Pelaksanaan F8 sebagai objek pariwisata memungkinkan Kota Makassar untuk memperkuat hubungannya dengan negara lain tanpa menggunakan kekuatan militer atau *hard diplomacy*.

b) Kerja Sama Internasional

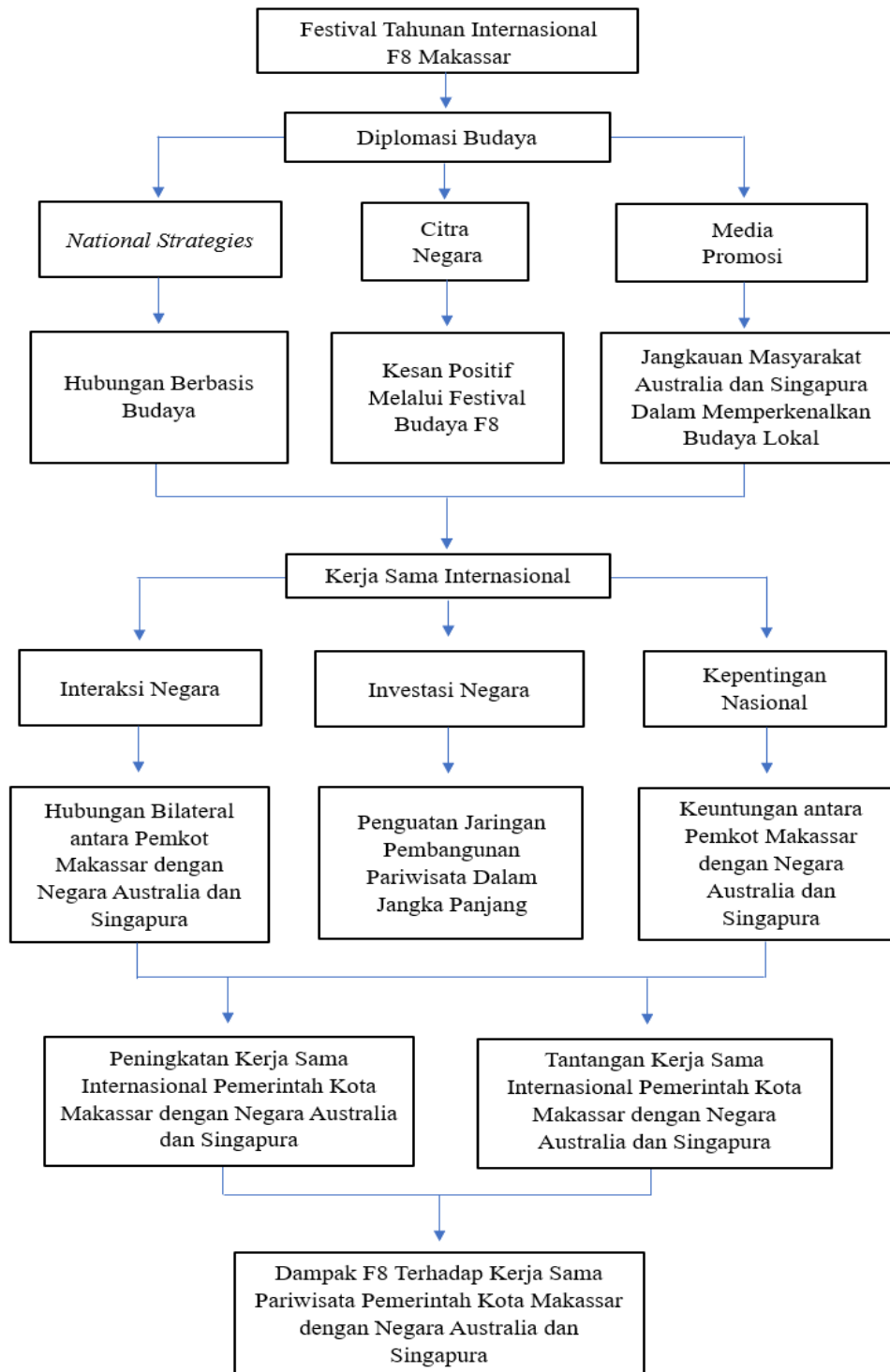
Kerja sama internasional bersifat umum dalam hal isu maupun aktor yang terjadi tidak hanya di individu, tetapi juga di partai politik, perusahaan, organisasi etnis, dan bangsa negara. Kerja sama internasional sering didefinisikan dalam konteks negara. Namun, kerja sama internasional juga dapat melibatkan aktor lain, seperti *Intergovernmental Organizations* (IGOs) dan *Nongovernmental Organizations* (NGOs) (Dai, Snidal, & Sampson, 2017, pp. 2-3). Kerja sama yang dibangun dalam pelaksanaan Festival F8 tidak hanya pada tingkat negara, tetapi juga melibatkan

Pemerintah Kota Makassar, instansi swasta, atau aktor individu lainnya yang berpartisipasi.

Leslie Johns menyatakan bahwa negara-negara akan semakin perlu untuk bekerja sama seiring dengan saling terhubungnya dunia melalui globalisasi, seperti kerja sama dalam bidang investasi asing, perdagangan internasional, perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, regulasi keuangan, dan bidang lainnya. Hasil kerja sama akan tercapai lebih baik dengan adanya kerja sama antarpemerintah yang tetap berada dalam parameter kerja sama dan hukum (Hurd, 2020, p. 4). Hubungan kerja sama pariwisata internasional yang dibangun melalui pelaksanaan F8 juga menjadi kesempatan untuk bisa memperkenalkan budaya lebih luas.

Kerja sama terjadi dimana masing-masing pihak sepakat untuk bekerja sama demi menghasilkan keuntungan yang tidak dapat diperoleh melalui tindakan sepihak. Kerja sama merujuk pada strategi aktor yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu isu tertentu. Konsep kerja sama menggambarkan suatu hubungan yang terbangun dari interaksi tertentu dan keinginan tersirat para pelaku untuk mempertahankan hubungan demi membina interaksi melalui pemecahan masalah bersama (Zartman & Touval, 2010, pp. 1-2). Upaya kerja sama dibangun dengan negara-negara yang berpartisipasi dalam Festival Internasional F8 adalah hasil kesepakatan antara beberapa pihak yang memiliki kepentingan, sehingga kerja sama tersebut tetap dipelihara sampai tahun 2024.

Bagan di bawah menggambarkan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu diplomasi budaya dan kerja sama internasional. Melalui analisis konsep diplomasi budaya dan kerja sama internasional, dapat ditemukan dampak dari penyelenggaraan F8 terhadap peningkatan kerja sama pariwisata serta tantangan yang dihadapi oleh negara Australia dan Singapura dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Dalam konsep diplomasi budaya, terdapat tiga kata kunci yaitu *national strategies*, citra negara, dan media promosi. Begitu juga dengan konsep kerja sama internasional yang memiliki tiga kata kunci, yaitu interaksi negara, investasi negara, dan kepentingan nasional. Kata kunci pada masing-masing konsep memiliki indikator dalam mengukur bagaimana F8 dapat berhasil digunakan sebagai media diplomasi budaya dan membangun kerja sama pariwisata dengan negara Australia dan Singapura. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan apakah festival tahunan internasional F8 berdampak pada peningkatan kerja sama pariwisata oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dengan negara Australia dan Singapura.



E. Metode Penelitian

E.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah studi tentang fenomena yang meliputi kualitas dan manifestasi. Penelitian kualitatif biasanya mencakup data berbentuk kata-kata dan bukan berbentuk angka untuk dapat lebih memahami ide, opini, atau pengalaman. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang fenomena sosial yang terjadi. Untuk dapat memahami fenomena sosial yang terjadi, penelitian kualitatif menggunakan studi kasus, analisis historis, dan analisis wacana (Ugwu, N, & Val, 2023, p. 20). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus Festival Tahunan Internasional F8 Makassar yang berdampak pada kerja sama pariwisata Kota dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui diplomasi budaya dengan menggunakan pariwisata sebagai media *soft diplomacy*.

E.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dengan mengambil data langsung dari Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata Kota Makassar melalui wawancara dan jenis data sekunder melalui studi kepustakaan tentang Festival F8 dan kerja sama pariwisata berdasar dari literatur yang telah ada sebelumnya, seperti jurnal, buku, artikel, serta sumber kredibel lainnya.

E.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan *library research* atau studi kepustakaan. Wawancara merupakan alat untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, wawancara didefinisikan sebagai bentuk wawancara yang dalam (*in depth interview*), semi struktur, dan tidak terstruktur. Jenis wawancara memerlukan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan tujuan penelitian serta pertanyaan lanjutan untuk digunakan dalam mengklarifikasi pernyataan narasumber dan gagasan yang muncul selama wawancara berlangsung (Elhami, 2022). Teknik pengumpulan data wawancara pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan Pemerintah Kota Makassar yang memiliki keterlibatan dalam Festival Tahunan Internasional F8, sedangkan teknik pengumpulan data studi kepustakaan pada penelitian ini diperoleh dari sumber bacaan berupa buku, jurnal, dan/atau artikel *website* terkait dengan Festival Tahunan Internasional F8 Makassar dan kerja sama pariwisata. Lokasi penelitian ini bertempat di Kota Makassar sebagai tempat berlangsungnya Festival Internasional F8 sejak tahun 2016. Penelitian ini berfokus pada dampak pelaksanaan F8 terhadap peningkatan kerja sama pariwisata internasional wilayah tersebut.

E.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data-data terkait dengan Festival Tahunan Internasional F8 dan kerja sama pariwisata yang dilakukan pemerintah Kota Makassar dengan negara-negara yang berpartisipasi di F8.

Kemudian, penulis menarik satu kesimpulan yang menjelaskan bagaimana dampak festival tahunan internasional F8 terhadap kerja sama pariwisata Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Diplomasi Budaya

Pada tahun 1970-an, terjadi perubahan dalam sistem internasional dengan munculnya teknologi. Kemunculan teknologi komunikasi digital mendorong terciptanya budaya, sehingga muncul aktor-aktor baru dalam diplomasi yang dianggap penting dalam rangka pembangunan pengetahuan dan kekuasaan. Oleh karena itu, transformasi lingkungan sosial, ekonomi, dan geopolitik menggerakkan diplomasi budaya sebagai bentuk intervensi baru oleh pemerintah (Zanella, Junior, & Silva, 2024, p. 3). Namun, terdapat beberapa perbedaan terkait dengan kemunculan diplomasi budaya. Meskipun perhatian terhadap diplomasi budaya baru dimulai pada tahun 1970, tetapi kemunculan konsep diplomasi budaya sudah ada jauh sebelum itu.

Liu Kexin menyatakan bahwa diplomasi budaya muncul setelah Perang Dunia I ketika Thomas Woodrow Wilson memimpin negara Amerika Serikat. Ketika dunia memasuki abad ke-20, diversifikasi menggerakkan dunia menuju pluralisme. Thomas Woodrow Wilson lalu memilih strategi diplomatik berdasarkan pada perekenomian Amerika Serikat yang kuat untuk menganjurkan penyelesaian permasalahan antarnegara melalui komunikasi dan dialog demi menjaga keamanan. Maka dari itu, para aktor mulai mencari cara diplomatik selain politik dan ekonomi (Kexin, 2021, p. 1030). Sedangkan, menurut Tatyana Gumenyuk et al, istilah diplomasi budaya muncul diperkenalkan pada sekitar tahun 1930-an oleh peneliti Amerika Serikat, yaitu F. Barghoorn. Barghoorn saat itu memiliki persepsi bahwa

diplomasi budaya digunakan untuk memanipulasi budaya dengan tujuan propaganda. Definisi kebijakan budaya pertama kali diperkenalkan oleh UNESCO pada meja bundar di Monako tahun 1967 dalam laporan Kebijakan Budaya – Pertimbangan Awal. Kebijakan budaya dipahami sebagai seperangkat prinsip, kegiatan, dan prosedur administratif yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam bidang budaya (Gumenyuk et al, 2021, p. 1550).

Natalia Grincheva sendiri berpendapat bahwa penggunaan diplomasi budaya dimulai pada tahun kedua abad ke- 20an di tengah Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Hal ini pernah ditulis pada bab 1 sebelumnya lalu dijelaskan lebih lanjut pada bab 2. Istilah diplomasi budaya ditemukan pada teks bahasa Inggris di *New York Times* karya Aline B. Luchheim, seorang kritikus seni pada tahun 1954. Lalu, diplomasi budaya didefinisikan pertama kali oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada tahun 1954 sebagai kontak berkelanjutan antara masyarakat dari berbagai negara agar dapat menciptakan kepercayaan internasional yang lebih baik. Diplomasi budaya sejak saat itu ditandai sebagai produk yang berasal dari Perang Dingin (Grincheva, 2024, p. 172). Gagasan tentang diplomasi budaya terus mengalami perkembangan terkait penggunaannya sebagai alat diplomasi yang awalnya bahkan dipandang sebagai alat propaganda dan produk dari Perang Dingin. Pada akhirnya, proses dalam diplomasi budaya adalah interaksi yang melibatkan terjadinya pertukaran nilai-nilai budaya. Selain menjadi kebijakan diplomatik suatu negara, diplomasi budaya juga menjadi perantara untuk mempromosikan masing-masing keunggulan budaya negara.

Secara historis, karakteristik diplomasi budaya terbentuk ketika terjadi hubungan secara administratif antarnegara, lalu budaya masuk melalui jalur perdagangan dan migrasi. Kemudian, para diplomat diplomasi budaya membawa apa yang terbaik dari budaya negara mereka dan kembali membawa pelajaran budaya dari negara yang mereka kunjungi. Dengan demikian, terbentuk istilah-istilah seperti “Hubungan Budaya Internasional” atau “Kebijakan Budaya Luar Negeri” yang menjadi dasar tentang apa itu diplomasi budaya (Zanella, Junior, & Silva, 2024, p. 4). Terdapat tiga cara diplomasi budaya, yaitu oleh pemerintah dalam organisasi internasional atau pameran seni, oleh pelajar dalam kegiatan pertukaran ke luar negeri, dan oleh informasi yang diperoleh dari buku, internet serta film. Yang terjadi dalam pertukaran budaya tidak hanya pertukaran suatu karya, tetapi juga nilai-nilai dan tradisi budaya dari negara tersebut.

Namun, diplomasi budaya tetap bersifat politis yang menjadi salah satu media diplomatik suatu pemerintah negara (Kexin, 2021, p. 1030). Dapat dimaknai bahwa aktor yang berperan dalam diplomasi budaya tidak hanya aktor negara, tetapi juga aktor non negara. Aktor negara dan non-negara bekerja untuk memajukan kepentingan nasional dan mempertahankan hubungan timbal balik. Diplomasi budaya juga penting untuk mengembangkan kondisi saling ketergantungan antarnegara dan menjadi tempat yang netral ketika jalur diplomatik lainnya bermasalah (Viartasiwi, Trihartono, & Hara, 2020, p. 23). Diplomasi budaya perlahan-lahan diakui sebagai media strategis untuk memperkuat hubungan diplomatik jangka panjang suatu negara dengan negara yang lain dengan manifestasi budayanya. Negara-negara maju telah menganggap sektor budaya

sebagai salah satu kunci dalam kebijakan luar negerinya. Alasan untuk ini, pertama-tama adalah penetrasi budaya suatu negara di negara-negara lain menjadikan nilai-nilai suatu negara tersebut jadi lebih mudah dipahami. Hal ini dapat mengurangi diferensiasi perbedaan budaya melalui kepentingan kedaulatan. Alasan lainnya adalah pembentukan citra positif dalam sistem internasional yang menyiratkan peningkatan hubungan nasional dari negara tersebut. Faktor ekonomi pun memerankan peran penting, dimana ekspor produk budaya ke pasar global merupakan salah satu pasar yang paling menguntungkan (Papaioannou, 2022, p. 46) . Potensi penguatan kedudukan dalam pasar global telah dilihat lebih dulu oleh negara maju yang memungkinkan negara-negara maju juga akan menguasai diplomasi budaya melalui pemanfaatan ekspor produk budayanya.

Diplomasi budaya pun tidak lepas dari dampak globalisasi. Di abad ke- 21, globalisasi memengaruhi pembentukan sistem baru hubungan internasional. *Soft power* mulai dianggap sebagai instrumen yang dapat meningkatkan pengaruh suatu negara pada dunia politik yang setara dengan bobot militer dan ekonomi. Menurut Joseph Nye dalam kutipan jurnal Tatyana Gumenyuk et al, konsep *soft power* mencakup tiga komponen penting, yaitu daya tarik negara, keindahan budaya, dan efektivitas kebijakan non-militer luar negeri (Gumenyuk et al, 2021, p. 1550). Salah satu perkembangan dari konsep *soft power* adalah diplomasi budaya yang merupakan turunan dari diplomasi publik. Pernyataan Chitty yang dikutip dalam jurnal N. Viartasiwi, A. Trihartono, dan A. E. Hara menyebut diplomasi publik dengan menggunakan instrumen budaya dapat menenangkan penantang kebijakan (Viartasiwi, Trihartono, & Hara, 2020, p. 23). Dalam penggunaannya, diplomasi

budaya menggunakan instrumen budaya sebagai kekuatannya, berbeda dengan penggunaan senjata yang terkonsep dalam *hard power* seperti militer. Diplomasi budaya menggabungkan kebijakan negara dengan kegiatan kebudayaan dan mempromosikan pengaruh budaya dalam aktivitas diplomatik negara (Gumenyuk et al, 2021, p. 1550).

Lebih lanjut, Ang et al dalam kutipan jurnal N. Viartasiwi, A. Trihartono, dan A. E. Hara berpendapat bahwa tidak selamanya daya tarik budaya dapat dikatakan *soft power*. Instrumen budaya dapat dikatakan efektif digunakan sebagai *soft power* apabila dijabarkan secara strategis dalam kebijakan yang terkait dengan kepentingan suatu negara. Misalnya, Amerika Serikat memanfaatkan budayanya untuk membangun citra positif pada dunia internasional untuk meningkatkan keamanan nasional dan mempertegas kedudukannya dalam dunia internasional (Viartasiwi, Trihartono, & Hara, 2020, p. 24). Selain itu, Inggris Raya juga adalah salah satu dari pemimpin dunia yang diakui dalam diplomasi budaya dan *soft power*. Keberhasilan Inggris Raya di antara lain adalah penyebaran bahasa Inggris, penyebaran pendidikan Inggris, dan bagaimana Inggris Raya berperan dalam sejarah dan budaya dunia internasional (Gumenyuk et al, 2021, p. 1559). Begitu juga dengan Korea Selatan yang mendapatkan perhatian masyarakat global dari diplomasi budayanya, yaitu *Korean Wave* atau *Hallyu*. *Korean Wave* merupakan pasar strategis industri budaya Korea Selatan yang bertujuan untuk memenangkan pasar global yang mencakup Kpop atau musik populer Korea serta film sinetron Korea. Di balik *Korean Wave*, terdapat campur tangan sektor swasta dan masyarakat sipil yang didukung oleh pemerintah Korea Selatan. Korea Selatan

mulai memanfaatkan *Korean Wave* sebagai *soft power* pada tahun 1990 saat masa kepemimpinan Kim Dae Jung (Viartasiwi, Trihartono, & Hara, 2020, p. 24). Efektivitas dari diplomasi budaya Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Korea Selatan dapat dirasakan hingga saat ini. Bahkan dengan tidak menggunakan kekuatan militer, masing-masing Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Korea Selatan mempunyai kedudukan yang kuat dan strategis dalam dunia internasional dari hasil diplomasi budayanya.

Kedudukan diplomasi budaya lambat laun akan menjadi prioritas sebagai kebijakan luar negeri dan hubungan diplomatik suatu negara. Beberapa ahli menyebut bahwa diplomasi budaya akan menjadi salah satu unsur utama dalam hubungan internasional di abad ke- 21 yang terbangun atas asas saling percaya antarnegara. Jelas bahwa diplomasi budaya tidak hanya mengenai transmisi dan penyebaran budaya, tetapi juga tentang bagaimana memahami budaya lain dan menjadi landasan untuk berkomunikasi serta membangun hubungan kerja sama. Sehingga, terjadi dialog antarbudaya dan tumbuh rasa saling menghormati oleh satu negara dengan negara lain (Papaioannou, 2022, p. 46). Diplomasi budaya dilakukan oleh aktor negara ataupun swasta yang tujuannya tidak jauh dari tujuan politik. Landasan politik dalam hal ini tidak hanya terbatas pada kekuasaan, tetapi juga bidang ekonomi, identitas, dan budaya. Sehingga, diplomasi budaya dapat dipahami sebagai mobilisasi budaya-budaya yang disengaja oleh aktor negara maupun aktor non-negara terhadap negara dan masyarakat luar negeri yang mencakup bidang politik, sosial, ekonomi, identitas, dan budaya yang beragam tetapi tetap dapat dikenali (Zanella, Junior, & Silva, 2024, p. 5). Budaya yang dipromosikan tentu

diharapkan ingin tetap dapat dikenali sebagai ciri khas suatu negara dalam upaya membentuk penguatan keamanan nasional, seperti Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Korea Selatan yang disebutkan pada paragraf sebelumnya. Diplomasi budaya bertugas untuk meningkatkan kerja sama budaya antarnegara, memperkuat hubungan antarnegara, menjaga keamanan nasional, dan memajukan kepentingan nasional (Gumenyuk et al, 2021, p. 1551).

Diplomasi budaya lantas juga merupakan sebuah media untuk suatu negara dapat mencapai kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional tersebut bisa saja mencakup banyak aspek, seperti aspek ekonomi, keamanan, politik, sosial, budaya, dan lainnya. Demi mencapai kepentingan nasionalnya melalui diplomasi budaya, diperlukan promosi yang kuat oleh suatu negara. Di suatu situasi tertentu, diplomasi budaya dapat menjadi senjata yang bermanfaat untuk menarik simpati negara lain. Negara-negara dengan citra positif yang kuat memungkinkan akan mendapat manfaat dari ikatan hubungan yang sudah dibangun, meskipun negara tersebut tidak membentuk aliansi keamanan secara formal. Contoh yang dapat diambil adalah situasi selama pandemi COVID-19. Saat pandemi baru saja terjadi, pasokan permintaan obat-obatan dan peralatan medis tidak seimbang antara negara-negara yang bersaing untuk mendapatkan obat dan peralatan tersebut. Korea Selatan sendiri mengklaim akan membantu Indonesia bersama UEA dan Amerika Serikat dikarenakan hubungan antara kedua negara tersebut terjalin dengan baik. Begitu pula dengan Jepang yang memprioritaskan Indonesia, Turki, dan Jerman untuk menerima obat flu Avigan secara gratis (Viartasiwi, Trihartono, & Hara, 2020, p. 24). Dengan demikian, diplomasi budaya merupakan salah satu pilihan utama para

aktor negara saat ini untuk memperkuat posisinya di mata internasional. Negara-negara maju memanfaatkan diplomasi budaya sebagai solusi dari permasalahan modern seperti pandemi COVID-19, yang berarti *soft power* dalam praktiknya berhasil untuk melanjutkan perdamaian hubungan diplomatik yang telah dibangun dan berpeluang besar apabila akan menjadi salah satu prioritas kebijakan luar negeri suatu negara.

Meskipun definisi diplomasi budaya melibatkan hubungan antarnegara, tetapi pelaksanaan diplomasi budaya dipercayakan pada aktor-aktor tertentu tiap negara. Aktor-aktor tersebut dipilih berdasarkan siapa yang dianggap akan bertanggung jawab oleh negara tersebut. Di beberapa kasus, aktor yang diberikan tanggung jawab adalah badan non-negara. Diplomasi budaya secara keseluruhan dapat dilakukan oleh negara atau badan publik. Pemerintah atau organisasi negara melakukan diplomasi budaya ataupun penyebaran nilai lokal budaya lainnya secara aktif untuk mempromosikan kepentingan nasional. Sektor swasta yang dalam hal ini adalah perusahaan swasta melakukan diplomasi budaya untuk mengembangkan komunikasi antarbudaya. Terobosan sektor swasta dalam produksi suatu budaya adalah salah satu fenomena yang terjadi di zaman modern saat ini. Fenomena tersebut disebabkan oleh keberadaan sponsor, donatur, dan kolektif yang aktif membuka praktiknya secara global. Untuk itu, sektor swasta perlu untuk mengembangkan hubungan kerja samanya agar dapat mencapai hasil yang terbaik (Papaioannou, 2022, p. 47). Salah satu aktor yang dipercayakan untuk bertanggung jawab dalam diplomasi budaya adalah pemerintah daerah. Dalam hal ini, penyelenggaraan festival F8 sebagai diplomasi budaya dipercayakan pada

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang bekerja sama dengan beberapa pihak lainnya, seperti Dinas Pariwisata (Dispar). Suatu festival selain fungsinya sebagai hiburan dan ruang berekspresi juga dapat menjadi instrumen politik (Ocon, 2022, p. 3) . Dengan demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berupaya dalam diplomasi budaya sebagai aktor non-negara melalui penyelenggaraan F8 sebagai media penghubung dengan negara-negara yang bekerja sama dengan F8 untuk meningkatkan citra positif Kota Makassar, sehingga dapat meningkatkan kerja sama pariwisata.



Gambar 2. Konsep Diplomasi Budaya
Sumber: Diolah Oleh Penulis

B. Konsep Kerja Sama Internasional

Kerja sama dalam hubungan internasional merupakan inti dari perspektif liberal atau liberalisme. Dalam teori politik liberal, gagasan kerja sama internasional dapat ditelusuri melalui sejarah panjang dari pemikiran yang

mengartikan suatu lembaga politik sebagai konsekuensi dari kehendak bebas. Tidak hanya itu, gagasan kerja sama internasional juga berasal dari kajian hubungan internasional yang dimuat pada tahun 1970 – 1980-an dalam kebangkitan analisis hubungan internasional rasionalis (Hurd, 2020, p. 4). Di antara beberapa teori dalam hubungan internasional, konsep kerja sama internasional menjadi turunan dari teori liberalisme. Liberalisme sendiri merupakan teori politik internasional yang mengutamakan organisasi internasional dan masyarakat global sebagai penyedia kesejahteraan dan perdamaian (Reinsberg B. , 2021, p. 287).

Pemikir liberal klasik menggagas konsep pemikiran positif tentang sifat manusia yang dielaborasi untuk memahami kenapa negara mau melakukan kerja sama. Kaum liberal memercayai manusia selalu belajar dari masa lalu dan dapat mencapai kemajuan sosial. Oleh karena itu, manusia mampu untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang damai. Secara alami, individu-individu akan bekerja berdasarkan sifat bawaannya sebagai manusia (Mingst, Mckibben, & Arreguin-Toft, 2019, p. 241). Individu dalam hal ini adalah aktor yang melakukan kerja sama. Meskipun dimaksudkan sebagai aktor negara atau *state actor*, negara dilihat sebagai “manusia” yang mau memperbaiki apa yang terjadi di masa lalu dan membangun perdamaian melalui hubungan kerja sama.

Dalam kisaran tahun 1970-an hingga 1980-an, berlangsung *great debate* dalam hubungan internasional yang memperdebatkan teori marxisme dengan teori neoliberalisme dan neorealisme. Neoliberalisme merupakan percabangan dari teori liberalisme. Gagasan kerja sama internasional dari kebangkitan analisis hubungan internasional rasionalis yang dimaksud pada paragraf pertama ialah neorealisme

dan neoliberalisme. Berfokus pada neoliberalisme, neoliberalisme menerima fakta sama seperti kaum realis bahwa sistem internasional bersifat anarkis dan tidak ada otoritas mana pun yang bisa memaksa negara melakukan kerja sama. Perbedaan antara neoliberalisme dengan realisme adalah neoliberalisme percaya bahwa negara akan melakukan kerja sama dengan alasan kepentingannya sendiri (Mingst, Mckibben, & Arreguin-Toft, 2019, p. 238). Neoliberalisme identik dengan ekonomi politik internasional yang didasari oleh kapitalisme pasca perang dunia pertama, dimana pasar dianggap dapat menciptakan wadah kerja sama. Oleh karena itu, dalam neoliberalisme, kerja sama internasional dapat terjadi apabila ada kepentingan bersama, seperti kepentingan ekonomi ataupun kepentingan lainnya yang dapat menguntungkan semua pihak.

Kaum realis sendiri menyatakan pandangannya bahwa kerja sama internasional adalah hal yang sangat sulit dicapai. Dua alasan yang menjadi penyebab mengapa hal tersebut akan mengalami kesulitan adalah perihal keuntungan yang relatif dan suatu hal yang disebut dengan *security dilemma* atau dilema pertahanan (Mingst, Mckibben, & Arreguin-Toft, 2019, p. 235). Bertolak belakang dengan liberalisme yang percaya negara mau memperbaiki apa yang terjadi di masa lalu dan mau menjalin hubungan baik melalui kerja sama, realisme memandang skeptis bahwa tidak akan terjadi kerja sama internasional oleh negara tanpa suatu tujuan tertentu. Ketika neoliberalisme meyakini bahwa kerja sama masih dapat terbangun meskipun dengan membawa kepentingan masing-masing, realisme memandang mustahil tercapainya satu tujuan dari kerja sama tersebut. Bagi pemikir realis, satu tujuan yang ingin dicapai dalam kerja sama tidak dapat

terjadi karena kepentingan masing-masing negara yang berbeda. Bisa saja satu negara menganggap tujuan kerja sama tersebut berhasil karena kepentingannya tercapai, tetapi pihak negara lain tidak menganggap itu mencapai tujuan karena tidak mendapatkan keuntungan dari kepentingannya.

Kerja sama memiliki pengertian yang lebih luas sebagai koordinasi tindakan dari dua atau lebih entitas untuk mencapai tujuan tertentu (Rueda-Fiorentino & Insignares-Cera, 2024, p. 134). Kerja sama yang dilakukan antara dua negara merupakan kerja sama bilateral, sedangkan kerja sama yang dilakukan antara banyak negara merupakan kerja sama multilateral. Kerja sama bilateral berfokus untuk menguntungkan masing-masing kedua belah pihak. Mengembangkan suatu hubungan kerja sama biasanya didasari oleh beberapa faktor. Ivo Viskovic dalam kutipan jurnal Ewa J. Bujwid-Kurek menyebut faktor-faktor penentu hubungan kerja sama diantaranya adalah kebijakan luar negeri, faktor geografis, faktor ekonomi, karakteristik negara, dan karakteristik politik suatu negara (Bujwid-Kurek, 2024, p. 53). Posisi geografis Indonesia seperti yang dijelaskan pada bab 1 dinilai strategis karena masuk dalam lintas perdagangan global. Negara-negara tetangga Indonesia diantaranya adalah Australia dan Singapura. Tepatnya, negara Australia berbatasan dengan Indonesia pada wilayah sebelah selatan dan negara Singapura berbatasan dengan Indonesia pada wilayah sebelah utara. Dengan berada pada posisi geografis yang strategis yaitu jalur perdagangan internasional, Indonesia dapat dengan mudah membangun kerja sama dengan negara-negara tetangga. Tidak hanya dapat membangun kerja sama internasional dalam perdagangan, tetapi juga membuka peluang dalam bidang lainnya, seperti ekonomi, teknologi, budaya, dan lainnya.

Khususnya dalam hal ini adalah Indonesia berpeluang untuk membangun kerja sama bilateral dengan negara Australia dan Singapura dalam bidang pariwisata.

Proses pertama dalam kerja sama adalah menyetujui, bernegosiasi, serta meratifikasi kesepakatan, aturan, dan perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah (Hurd, 2020, p. 5). Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai aktor yang melakukan kerja sama. Dalam hubungan internasional, aktor yang dapat melakukan kerja sama terdiri dari *state actor* dan *non-state actor*. *State actor* atau aktor negara terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau pemerintah subnasional, sedangkan *non-state actor* atau aktor non-negara terdiri dari NGOs (*Non Governmental Organizations*) atau organisasi non-pemerintah, IGOs (*Intergovernmental Organizations*) atau organisasi pemerintah, dan individu. Pemerintah subnasional menjadi aktor yang semakin menonjol. Para pemerintah subnasional menjalankan tugasnya dalam mengambil kebijakan luar negeri otonom dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, investasi, perubahan iklim, dan migrasi (Reinsberg & Dellepiane, 2023, p. 922). Kerja sama internasional yang melibatkan pemerintah daerah atau pemerintah subnasional dengan pemerintah pusat negara lain disebut juga kerja sama subnasional.

Contoh kerja sama subnasional adalah kerja sama pemerintah Ekuador pada sekitar tahun 2007 – 2018. Pada tahun 2011, pemerintah pusat memberikan tanggung jawab terhadap pengelolaan kerja sama internasional pada pemerintah daerah atau pemerintah subnasional (Zambrano & Avellaneda, 2021, p. 24). Dengan memberikan hak otonomi pada pemerintah daerah, pemerintah pusat secara tidak langsung mengakui potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pemerintah pusat

baru memberikan hak pengelolaan kerja sama internasional oleh pemerintah daerah pada tahun 2011, artinya sebelum tahun 2011 seluruh pengelolaan kerja sama internasional Ekuador menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Anggapan bahwa mengapa suatu daerah dapat diberikan otoritas dalam kebijakan luar negeri untuk menjalin kerja sama adalah politik dalam negeri (Reinsberg & Dellepiane, 2023, p. 924). Akibatnya, daerah tersebut kini memiliki identitas politiknya sendiri yang dinilai dapat memperkuat eksistensinya di dunia internasional.

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengupayakan terjadinya peningkatan kerja sama dengan negara Australia dan negara Singapura melalui penyelenggaraan festival internasional F8 sebagai suatu bentuk upaya untuk mencapai tujuan bersama. Kota Makassar yang merupakan salah satu kota jalur perdagangan di Indonesia Timur menjadi suatu potensi tersendiri hingga dapat menjadi kekuatan bagi Kota Makassar untuk ingin melakukan kerja sama subnasional dalam konteks membangun kerja sama internasional. Peran festival tahunan internasional F8 adalah sebagai suatu media diplomasi budaya yang menghubungkan pemkot Makassar dengan negara-negara yang berpartisipasi dalam F8, khususnya Australia dan Singapura. Kerja sama yang dibangun oleh pemkot Makassar dengan negara Australia dan Singapura merupakan salah satu contoh kerja sama subnasional, yaitu pemkot Makassar sebagai pemerintah daerah yang bekerja sama dengan pemerintah pusat negara Australia dan Singapura. Kerja sama yang dibangun melalui penyelenggaraan F8 diharapkan mampu menjadi hubungan kerja sama jangka panjang, sehingga dapat membuka peluang kerja sama

dalam bidang lainnya bagi Pemkot Makassar maupun pemerintah negara Australia dan Singapura.



Gambar 3. Konsep Kerja Sama Internasional
Sumber: Diolah oleh Penulis

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber penelitian terdahulu yang dianggap relevan untuk meneliti bagaimana F8 dapat menjadi festival budaya yang meningkatkan kerja sama pariwisata Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dengan negara Australia dan Singapura. Beberapa sumber penelitian ini dapat membantu penulis untuk membangun landasan penelitian, sehingga menjadi bahan referensi untuk meneliti topik penelitian. Diantaranya, sumber penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a) Penelitian oleh Rizki Kumala, Renaldi Afriansyah, dan Laurensius Gleko yang berjudul “*Hubungan Kerjasama Sister City Antara Kota Batam dengan Kota Gimje Dalam Bidang Pariwisata*” (Kumala, Afriansyah, & Gleko, 2023).

Penelitian tersebut mengkaji hubungan kerja sama *sister city* antara Kota Batam, Indonesia dengan Kota Gimje, Korea Selatan menggunakan teori paradiplomasi dan liberalisme yang melihat dampak kerja sama keduanya terhadap aspek pariwisata, budaya, dan ekonomi. Dalam hubungan kerja sama tersebut, terjadi penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) dan LoI (*Letter of Intent*) yang meningkatkan peluang dalam aspek pariwisata.

Apabila dibandingkan dengan penelitian ini, keduanya sama-sama berdasar dari hubungan kerja sama *sister city* atau kota kembar. Kerja sama *sister city* sendiri adalah kerja sama yang dibangun oleh kota dari dua negara yang berbeda, dimana kedua kota tersebut memiliki kemiripan dalam suatu bidang. Namun dalam penelitian ini, hubungan kerja sama *sister city* menjadi suatu langkah awal yang telah berkembang menjadi kerja sama pariwisata, yaitu *sister city* antara Lismore, Australia dengan Ujung Pandang (Makassar), Indonesia. Kerja sama yang bermula dari kerja sama *sister city* menarik potensi berkembangnya kerja sama dalam bidang lain yaitu bidang pariwisata, sehingga terjadi peningkatan kerja sama dengan negara Australia yang ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan festival internasional F8 seperti yang telah dijelaskan pada bab 1.

- b) Penelitian oleh Hasri Maghfiratin Nisa yang berjudul “*Paradiplomasi Melalui Sister City Pemerintah Kota Denpasar dan Mossel Bay: Implementasi dan Pengalihan Kerja Sama*” (Nisa, 2022). Penelitian tersebut membahas tentang kolaborasi *sister city* antara Kota Denpasar, Indonesia dengan Kota Mossel Bay, Afrika Selatan menggunakan konsep *sister city*. Kedua negara berfokus pada aspek politik, budaya, dan ekonomi dengan penekanan pada pengembangan pariwisata. Dalam penelitian tersebut, digunakan metodologi

deskriptif kualitatif untuk meneliti hasil dari hubungan internasional antara kedua wilayah tersebut dan menyoroti pentingnya pemerintah daerah dalam diplomasi global.

Apabila dibandingkan dengan penelitian ini dan sumber penelitian terdahulu sebelumnya, ketiganya juga membahas hal yang sama yaitu kerja sama *sister city*. Namun, dalam sumber penelitian tersebut lebih berfokus untuk meneliti bagaimana peran pemerintah daerah, tepatnya pemerintah daerah Bali sebagai aktor diplomasi global dalam hubungan kerja sama global dengan Afrika Selatan. Sedangkan, penelitian ini membahas tentang bagaimana peran Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar sebagai aktor subnasional dalam meningkatkan kerja sama pariwisata dengan negara Australia dan Singapura melalui pelaksanaan F8.

- c) Penelitian oleh Putu Wisnu Saputra dan Ida Kade Suparta yang berjudul *“Festival Budaya Isen Mulang Sebagai Upaya Promosi Pariwisata Budaya di Provinsi Kalimantan Tengah”* (Saputra & Suparta, 2023). Penelitian tersebut membahas tentang Festival Budaya Isen Mulan di Kalimantan Tengah, Indonesia yang digunakan untuk mempromosikan pariwisata budaya lokal Kalimantan Tengah melalui teknik analisis induktif. Festival Budaya Isen Mulan sebagai promosi pariwisata lokal bertujuan untuk menarik perhatian nasional dan internasional terhadap budaya Kalimantan Tengah demi meningkatkan ekonomi lokal.

Apabila dibandingkan dengan penelitian ini, terdapat kesamaan dalam membahas festival budaya yang diselenggarakan oleh suatu wilayah demi menjangkau atensi masyarakat internasional sebagai bagian dari promosi pariwisata. Penelitian ini sendiri menggunakan festival internasional F8 untuk

memperkuat diplomasi budaya yang menjembatani peningkatan hubungan kerja sama pariwisata dengan negara Australia dan Singapura. Untuk mendukung penguatan diplomasi budaya, dilakukan promosi yang menjangkau masyarakat internasional.

- d) Penelitian oleh Cristi Devi Darnita yang berjudul “*Dampak Ekonomi, Pariwisata, dan Budaya Festival Isen Mulang di Kalimantan Tengah 2023*” (Darnita, 2024). Penelitian tersebut menggambarkan secara umum bagaimana Festival Budaya Isen Mulang yang dilaksanakan pada tahun 2023 berhasil menarik puluhan ribu pengunjung dan menghasilkan omset ekonomi yang besar dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Secara tidak langsung, penelitian tersebut menunjukkan keberhasilan suatu festival budaya sebagai media promosi.

Apabila dibandingkan dengan penelitian ini dan sumber penelitian sebelumnya, ketiganya memiliki kesamaan topik pembahasan, yaitu penyelenggaraan festival budaya. Sumber penelitian tersebut membuktikan penyelenggaraan festival sebagai media promosi, dimana hal serupa juga dilakukan pada penelitian ini untuk meneliti upaya keberhasilan diplomasi budaya melalui media promosi festival internasional F8 yang menargetkan peningkatan kerja sama pariwisata dengan negara Australia dan Singapura.

- e) Penelitian oleh Muhammad Diva, Muhammad Abdul Azis, dan Shannaz Mutiara Deniar yang berjudul “*Festival Wisata Budaya Internasional 2023 Sebagai Paradiplomasi dan Upaya Pelestarian Budaya Lokal Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan*” (Diva, Azis, & Deniar, 2024). Penelitian ini mengkaji penyelenggaraan Festival Pariwisata Budaya Internasional 2023 di Kalimantan Selatan oleh Pemerintah Provinsi sebagai bentuk diplomasi yang

bertujuan untuk mempromosikan dan melestarikan budaya lokal, serta menarik wisatawan mancanegara dengan menggunakan teori pariwisata berkelanjutan.

Apabila dibandingkan dengan penelitian ini, keduanya memiliki kesamaan topik penelitian yaitu festival budaya internasional sebagai media diplomasi. Penelitian ini meneliti apakah penyelenggaraan festival internasional F8 sebagai media diplomasi budaya berdampak pada peningkatan kerja sama pariwisata Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dengan negara Australia dan Singapura.